

## PENGARUH TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN PADA MASA COVID -19 DI INDONESIA

**Putri Abistha <sup>1)</sup>; Siti Nurhaliza <sup>2)</sup>; Vita Mulyana <sup>3)</sup>**  
Politeknik Keuangan Negara STAN

Correspondence		
Email: <a href="mailto:bistha_3072230012@pknstan.ac.id">bistha_3072230012@pknstan.ac.id</a> , <a href="mailto:siti_3072230010@pknstan.ac.id">siti_3072230010@pknstan.ac.id</a> , <a href="mailto:vita_3072230004@pknstan.ac.id">vita_3072230004@pknstan.ac.id</a>	No. Telp:	
Submitted 9 Juli 2024	Accepted 12 Juli 2024	Published 19 Juli 2024

### ABSTRACT

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan guncangan ekonomi global yang signifikan. Perekonomian dunia mengalami kontraksi pada tahun 2020, bahkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2021 diperkirakan 5% lebih rendah dari proyeksi awal. Tekanan ekonomi ini dirasakan di semua sektor, terutama sektor non-pertanian. Akibatnya, tingkat kemiskinan meningkat hingga mencapai 119-124 juta jiwa (World Bank, 2021). Selain peningkatan kemiskinan, pandemi Covid-19 juga berdampak signifikan terhadap tingkat pengangguran. Banyak perusahaan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja dan mengurangi jumlah karyawan untuk bertahan. Hal ini menambah jumlah pengangguran, yang pada gilirannya memperburuk tingkat kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak tingkat pengangguran terhadap kemiskinan akibat pandemi Covid-19 di Indonesia, serta menganalisis strategi yang dapat diambil oleh pemerintah untuk mencegah peningkatan angka pengangguran. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memetakan strategi jangka pendek dan jangka panjang yang diperlukan sebagai pelengkap strategi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, artikel, dan situs web untuk mengakses data dan informasi terkini terkait strategi pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran akibat dampak pandemi Covid-19. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah tingkat pengangguran secara signifikan meningkatkan kemiskinan di Indonesia selama masa COVID-19. Kebijakan pembatasan sosial menurunkan aktivitas ekonomi dan menyebabkan banyak PHK. Pemerintah meluncurkan berbagai kebijakan, seperti Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdampak pandemi.

**Kata kunci:** Pandemi COVID-19; Pengangguran; Kemiskinan; Program PEN

### PENDAHULUAN

Covid-19 telah mengubah wajah sosial ekonomi dunia secara drastis dan mengubah arah perekonomian global yang semula optimis membaik menuju resesi. Pembatasan gerak dan interaksi yang masif membawa konsekuensi pada perekonomian. Kebijakan-kebijakan yang tidak dapat dihindari seperti lockdown, physical distancing, travel ban/restriction, dan lainnya menimbulkan konsekuensi turunnya aktivitas ekonomi secara signifikan, yang tentunya menghasilkan implikasi yang sangat besar (Prasetyo, H., & Setiadi, W., 2023).

Kemunculan Covid 19 di dunia tentunya mempengaruhi sektor sosial, kesehatan, dan salah satunya mempengaruhi perekonomian dunia khususnya perekonomian Indonesia. Dengan adanya dampak Covid 19 terhadap perekonomian dunia, otomatis akan berdampak pada tingkat pengangguran. Dalam laporan tertulis dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) tahun 2020, tingkat pengangguran pada tahun 2020 lebih tinggi dari krisis tahun 2008. Penyebabnya adalah ledakan Covid-19 yang melanda dunia. OECD mencatat tingkat pengangguran pada Februari 2020 sebesar 5,2%, kemudian pada Mei 2020 terjadi peningkatan menjadi 8,4%.

Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik tahun 2021, penduduk kerja yang terdampak Covid 19 pada bulan Februari 2021 berjumlah 10,02 juta orang turun hingga 34,41% menjadi 19,10 dibandingkan dengan bulan Agustus 2020. Penduduk usia kerja harus menganggur



sejumlah 1,62 juta orang akibat Covid 19; 0,65 juta Bukan Angkatan Kerja (BAK) akibat Covid-19; 1,11 juta harus rela kehilangan pekerjaannya sementara karena Covid 19; dan 15,72 juta pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja akibat Covid-19. Keempat komponen tersebut mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2020. Penurunan terbesar terjadi pada komponen angkatan kerja yang mengalami penurunan jadwal kerja akibat Covid-19 menjadi 8,31 juta orang.

Dari data yang diuraikan di atas, terlihat bahwa pertumbuhan kasus COVID-19 sangat mempengaruhi tingkat pengangguran di Indonesia. Meskipun angka pengangguran di Indonesia menurun sebesar 34,41% dari tahun 2020 ke tahun 2021, namun jumlah kasus COVID-19 terus meningkat. Pada pertengahan tahun 2021, lonjakan kasus COVID-19 yang signifikan kemungkinan akan memicu kebijakan baru dari pemerintah yang berdampak pada perekonomian nasional, dan ini akan mempengaruhi kembali tingkat pengangguran. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan menganalisis lebih mendalam dampak pandemi COVID-19 terhadap tingkat pengangguran di Indonesia.

## KAJIAN PUSTAKA

### Covid 19 di Indonesia

COVID-19 atau virus corona adalah wabah penyakit menular dengan tingkat penularan yang sangat cepat dan dapat menyerang semua usia dan berpotensi menyebabkan kematian (Mardiyah & Nurwati, 2020). Angka kematian akibat virus ini sangat tinggi dan terus meningkat. Wabah ini adalah penyakit baru yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China, pada Desember 2019. Indonesia mengkonfirmasi masuknya virus COVID-19 pada 2 Maret 2020. Pada 11 Maret 2020, kasus kematian pertama warga Indonesia akibat COVID-19 dilaporkan.

Pemerintah Indonesia telah mempertimbangkan dampak terburuk dari COVID-19 dengan skenario terburuk. Pertumbuhan kasus COVID-19 jelas mempengaruhi peningkatan kemiskinan dan pengangguran. Padahal, dalam 5 tahun terakhir, pemerintah berhasil mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Namun, kehadiran COVID-19 telah menghancurkan perekonomian di berbagai negara, termasuk Indonesia.

### Pengangguran

Pengangguran adalah sebuah golongan angkatan kerja yang belum melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan uang (Kasnelly, 2020). Pengangguran tidak terbatas pada orang yang belum bekerja. Orang yang sedang mencari pekerjaan dan orang yang bekerja namun pekerjaannya tidak produktif pun dapat dikategorikan sebagai pengangguran. Pengertian pengangguran dalam arti luas adalah penduduk yang tidak berkerja atau tidak memiliki pekerjaan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran adalah penduduk umur 15 tahun ke atas yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

#### a. Jenis- Jenis Pengangguran:

Menurut Sukirno (2006) sebab terjadinya pengangguran dapat digolongkan kepada tiga jenis yaitu:

1. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang wujud apabila ekonomi telah mencapai kesempatan kerja penuh.
2. Pengangguran struktural, terjadi karena adanya perubahan dalam struktur atau komposisi perekonomian.
3. Pangangguran teknologi, ditimbulkan oleh adanya pengantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia yang disebabkan perkembangan teknologi.

**b. Faktor Penyebab Pengangguran**

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran, yaitu karena kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat, pengembangan sektor ekonomi non-real, pendidikan yang rendah dan tidak memiliki keterampilan, keterbatasan lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja, kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja, memiliki pendidikan yang tinggi tapi tidak memiliki peluang kerja dikarenakan tidak memiliki akses sehingga berpotensi untuk tidak dapat tertampungnya lulusan program pendidikan di lapangan kerja yang setiap tahun selalu meningkat. Selain itu juga kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja.

Fenomena pengangguran juga berkaitan erat dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja, yang disebabkan antara lain, perusahaan yang menutup/mengurangi bidang usahanya akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif; peraturan yang menghambat investasi, hambatan dalam proses ekspor impor, dan lain-lain. Keterbatasan lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia sangat cukup tinggi dari tahun ke tahun, lapangan pekerjaan merupakan indikator penting tingkat kesejahteraan masyarakat dan sekaligus menjadi indikator keberhasilan penyelenggaraan pendidikan dalam mengurangi angka kemiskinan yang ada (Siregar et al., 2020)

**c. Dampak Pengangguran**

Pengangguran berdampak signifikan pada perekonomian dan kehidupan masyarakat. Dari sisi perekonomian, pengangguran menyebabkan penurunan pendapatan rata-rata per kapita, penurunan penerimaan pemerintah dari sektor pajak, dan peningkatan biaya sosial yang harus ditanggung pemerintah, yang pada akhirnya menambah beban hutang negara. Sementara itu, dampak pada masyarakat mencakup hilangnya keterampilan karena tidak digunakan, ketidakstabilan politik dan sosial, serta beban psikis dan psikologis bagi penganggur dan keluarganya. Lebih jauh lagi, pengangguran dapat memicu peningkatan aksi kriminalitas atau kejahatan, mengganggu ketertiban dan keamanan dalam masyarakat (Siregar et al., 2020).

**Kemiskinan**

Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan disebut sebagai masalah sosial ekonomi keadaan seseorang atau sekelompok orang yang hak dasarnya tidak terpenuhi. Sedangkan menurut BPS (2020), berdasarkan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun nonmakanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan kata lain, kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti pangan, perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

Secara teoritis, kemiskinan dibagi menjadi dua, yaitu kemiskinan struktural dan kemiskinan multidimensi (Niko, 2019). Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh keadaan ketidakberdayaan individu atau kelompok untuk menjalani kehidupan yang layak atau memenuhi standar garis kebutuhan hidup. Jenis kemiskinan ini mendefinisikan individu sebagai orang yang tidak berdaya untuk merubah nasib hidupnya. Di sini, faktor malas bekerja bukanlah penyebab terjadinya kemiskinan jenis ini. Kemiskinan ini dapat dilihat dari struktur sosial masyarakat. Struktur sosial dalam masyarakat dapat menjadi penghambat mobilitas masyarakat yang relatif miskin untuk mengubah nasibnya. Hal ini karena struktur sosial terkadang memberlakukan pembatasan terhadap hak-hak individu di kelas bawah.

## Upaya Pemerintah Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran Dan Kemiskinan

Pandemi Covid-19 memiliki dampak luas bagi kehidupan masyarakat. Dampak pandemi tersebut tidak hanya dirasakan dalam skala nasional, tetapi juga skala global yang melibatkan hampir seluruh negara di dunia. Munculnya pandemi tersebut kemudian mendorong pemerintah melaksanakan sejumlah kebijakan dalam upaya memitigasi dampak pandemi pada kegiatan ekonomi masyarakat. Signifikansi dampak pandemi terhadap peningkatan pengangguran dan kemiskinan merupakan konsekuensi logis dari respon kebijakan pemerintah terhadap penyebaran virus tersebut. Untuk menghindari efek pengangguran, pemerintah terus secara terus menerus mengatasi masalah pengangguran.

Selama masa pandemi COVID-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia, pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan yang semakin meningkat. Upaya ini menjadi penting mengingat dampak ekonomi yang signifikan yang ditimbulkan oleh pembatasan sosial dan ekonomi yang diberlakukan untuk mengendalikan penyebaran virus. Salah satu langkah utama yang diambil oleh pemerintah adalah melalui program bantuan sosial yang meliputi bantuan tunai langsung kepada masyarakat terdampak, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Program Sembako. Selain itu, pemerintah juga mendorong program-program peningkatan keterampilan dan pelatihan bagi para pencari kerja agar dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar tenaga kerja yang berubah akibat pandemi.

## METODE PENELITIAN

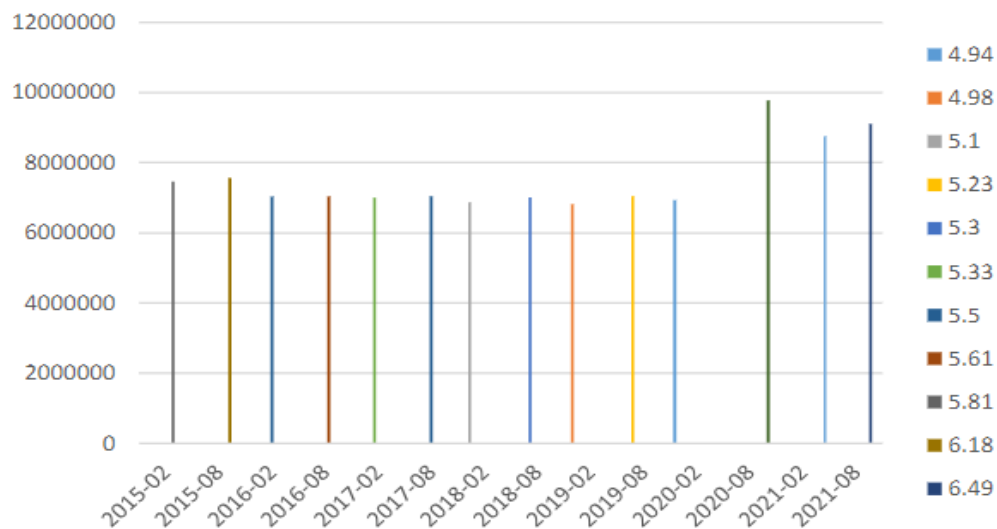
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah ada pada objek penelitian atau data hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya (Budiman et al., 2014). Sedangkan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu studi yang diperoleh dari berita online, buku-buku karya ilmiah, tesis, internet dan sumber lainnya (Sumarni, 2020). Teknik ini diterapkan untuk mendapatkan dasar-dasar dan temuan tertulis dengan mempelajari berbagai literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti. Tujuan dari metode kualitatif deskriptif ini adalah untuk memberikan deskripsi dan gambaran yang membantu menjawab pertanyaan penelitian tentang dampak tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia, kebijakan pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan akibat pandemi COVID-19, serta strategi tambahan yang dapat mendukung kebijakan tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Kemiskinan Akibat Pandemi Covid 19

Pengangguran merupakan masalah yang sangat serius, hal ini bisa mempengaruhi angka tingkat kemiskinan. Pengangguran diartikan bahwa pendapatan seseorang menurun dan itu juga akan mengurangi tingkat kesejahteraan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Ishak et al., 2020). Pengangguran akan menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial. Seseorang yang menganggur tidak dapat memenuhi kebutuhannya karena tidak memiliki penghasilan, yang di mana semakin turunnya tingkat kesejahteraan akan memicu timbulnya masalah kemiskinan. Pengangguran ini terjadi karena banyaknya jumlah angkatan kerja tetapi tidak sebanding dengan kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan yang ada.

Gambar 1. Tingkat Pengangguran Terbuka



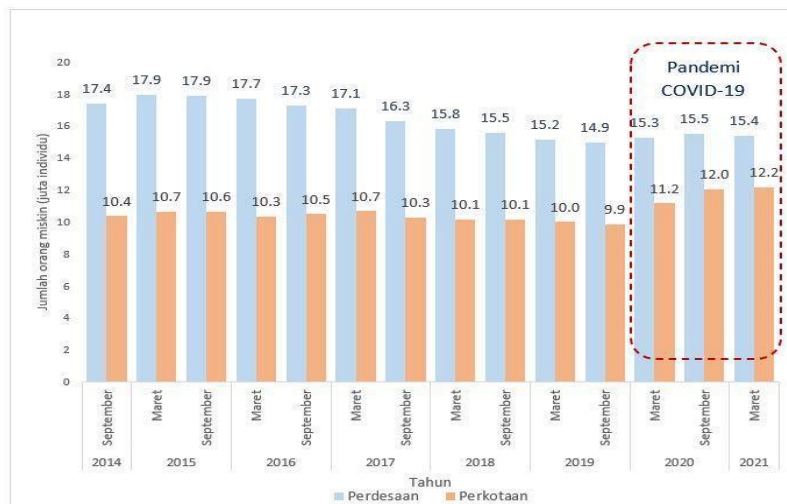
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan berbagai perusahaan di Indonesia secara bersamaan atau serentak melakukan PHK atau Pemutusan Hubungan Kerja sehingga tingkat pengangguran menjadi meningkat signifikan. Hal tersebut didukung oleh laporan dari BPS di Indonesia bahwa pengangguran di bulan Agustus 2021 sebesar 6,49%, menurun dari Februari 2021 9,27% dan pada Agustus 2020 pada angka 7,07%. Berdasarkan penjelasan BPS, jumlah ini sebagai akibat dari fenomena pandemi Covid-19. Adapun tingkat pengangguran terbuka yang terjadi di Indonesia ditunjukkan pada Gambar 1. Pada pertengahan tahun 2021, lonjakan kasus COVID-19 yang signifikan kemungkinan akan memicu kebijakan baru dari pemerintah yang berdampak pada perekonomian nasional, dan ini akan mempengaruhi kembali tingkat pengangguran.

Selain itu, kemiskinan dikaitkan dengan kurangnya lapangan kerja, karena kemiskinan menyangkut pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan. Kemiskinan biasanya digambarkan sebagai situasi di mana seorang individu atau sekelompok orang tidak dapat menikmati atau mencukupi hak atau kebutuhan hidup yang mendasar untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak. Masalah kemiskinan masih berkaitan dengan jumlah penduduk yaitu jumlah lapangan kerja yang tersedia tetapi belum mampu memenuhi tuntutan tenaga kerja yang baru dikembangkan, mengakibatkan pengangguran. Selain jumlah penduduk, pengangguran, dan taraf hidup diduga turut berperan dalam terjadinya kemiskinan.

Pengukuran kemiskinan di Indonesia dilakukan oleh beberapa institusi pemerintahan. Salah satu institusi tersebut yaitu Dinas Sosial. Pengukuran kemiskinan oleh Dinas Sosial melibatkan berbagai indikator berbasis pada tingkat kesejahteraan sosial-ekonomi nasional (TNP2K, 2018). Masyarakat yang memiliki status kesejahteraan sosial-ekonomi pada 40% terendah merupakan kelompok masyarakat dalam Basis Data Terpadu tersebut.

Gambar 2. Jumlah Orang Miskin Indonesia 2014-2021 (Juta Orang)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik tersebut menunjukkan jumlah orang miskin di Indonesia dari 2014 hingga 2021, dengan data yang dibedakan antara perdesaan dan perkotaan. Dari 2014 hingga 2019, jumlah orang miskin cenderung menurun. Namun, pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menyebabkan peningkatan signifikan jumlah orang miskin baik di perdesaan maupun perkotaan. Pada Maret 2020, jumlah orang miskin di perdesaan mencapai 15,3 juta dan di perkotaan 11,2 juta, meningkat lagi pada September 2020 menjadi 15,5 juta dan 12 juta. Pada Maret 2021, meskipun sedikit menurun, jumlahnya masih lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi, menunjukkan dampak ekonomi yang signifikan dari COVID-19.

Pandemi Covid-19 memiliki imbas yang sangat besar pada pertumbuhan ekonomi, berkurangnya aktivitas ekonomi masyarakat membuat pertumbuhan ekonomi menurun, yang menyebabkan naiknya angka kemiskinan. Data dari BPS menunjukkan bahwa pada kuartal ketiga 2020 tingkat kemiskinan di Indonesia adalah 10,19 persen, secara year on year naik cukup jauh dari yang sebelumnya hanya 9,22 persen. Pandemi Covid-19 menyebabkan ketidakmerataan yang tinggi pada perkotaan, namun tidak terlalu tinggi pada tingkat pedesaan, hal ini menandakan bahwa ketimpangan yang terjadi di perkotaan jauh lebih serius daripada pedesaan.

Berdasarkan teori menurut Fitria Leni (2021:60) pengangguran yang terjadi di suatu wilayah menggambarkan adanya pengaruh yang buruk dimana tingginya tingkat pengangguran akan mengakibatkan terjadinya peningkatan angka kemiskinan karena kurangnya pendapatan yang diterima dan berakibat pada terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dan jika masyarakat tidak menganggur berarti mempunyai pekerjaan dan penghasilan, kemudian dengan penghasilan yang dimiliki dari bekerja diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Jika kebutuhan hidup di penuhi maka tidak akan miskin sehingga dikatakan dengan tingkat pengangguran rendah juga dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan. Hal tersebut terjadi karena masyarakat yang tergolong dalam angka kerja yang belum bisa mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dan akan berdampak pada penurunan produktifitas, sehingga sumber daya yang seharusnya terkelola dengan baik menjadi tidak maksimal.

Berdasarkan analisis teori di atas dapat disimpulkan bahwa pengangguran seringkali di bahas di berbagai negara. Berbicara pengangguran tentu tidak lepas dari yang namanya

negara berkembang, banyak negara berkembang yang kemudian mempunyai masalah yang sama mengenai pengangguran.

## 2. Kebijakan Pemerintah Indonesia Mengurangi Angka Pengangguran Akibat Pandemi Covid 19

Pada Desember 2019, virus corona ditemukan pada manusia di Wuhan, China, dan diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Corona virus 2 (SARS-COV2), menyebabkan penyakit COVID-19 yang menyebar ke seluruh dunia. Upaya pencegahan dan penanganan dilakukan oleh seluruh negara, termasuk travel advice, lockdown, dan lainnya. Indonesia menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020, yang memperkenalkan istilah seperti Work from Home dan sekolah online. Upaya ini berdampak signifikan pada kesehatan, sosial, dan ekonomi, menyebabkan berhentinya aktivitas ekonomi di berbagai sektor dan penurunan kinerja ekonomi. Selanjutnya, untuk meredam dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian nasional, pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi. Salah satunya adalah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. Program PEN dilaksanakan dengan prinsip asas keadilan sosial, sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mendukung Pelaku Usaha, menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta-tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah mengalokasikan dana APBN untuk program PEN sebesar Rp695,23 triliun yang didistribusikan untuk 6 kluster, yaitu kesehatan, perlindungan sosial, sektoral kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah, UMKM, pembiayaan korporasi dan insentif usaha. Dari keenam kluster tersebut, ada beberapa contoh program yang ditujukan untuk menekan peningkatan pengangguran selama pandemi Covid-19 di tahun 2020, yaitu: program Kartu Prakerja; program padat karya Kementerian/Lembaga (K/L); dan dukungan sektor UMKM.

### A. Program Kartu Prakerja

Program Kartu Prakerja merupakan program yang awalnya dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan menggunakan metode pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dengan harapan lulusannya dapat bekerja atau berwirausaha dari hasil pelatihan. Program ini sudah direncanakan oleh pemerintah sejak awal untuk memberantas kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran di Indonesia dengan tujuan untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Namun, dengan adanya pandemi Covid-19, program Kartu Prakerja mengalami refocusing menjadi semi bantuan sosial seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020. Program Kartu Prakerja yang memberikan pelatihan dan insentif, juga diharapkan mampu membantu masyarakat yang kehilangan pekerjaan.

Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 20 triliun untuk Kartu Prakerja, meningkat dari rencana awal Rp 10 triliun, mengubah fokus dari jaring pengaman pencari kerja menjadi bantuan sosial bagi mereka yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi (Fauzia, 2020). Penerima manfaat, termasuk pekerja terkena PHK, pekerja informal, dan usaha mikro kecil terdampak COVID-19, menerima biaya pelatihan Rp 1 juta, insentif pasca pelatihan Rp 600 ribu per bulan selama 4 bulan, dan insentif survei evaluasi Rp 150 ribu untuk 3 kali survei.

#### B. Program Padat Karya Kementerian/Lembaga (K/L)

Program padat karya K/L merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan penghasilan sementara bagi pekerja harian yang kehilangan pendapatan akibat pandemi Covid-19. Program padat karya mengacu pada jenis strategi pembangunan ekonomi atau proyek yang sangat bergantung pada tenaga kerja manual dan mempekerjakan sejumlah besar pekerja. Program ini bertujuan untuk menciptakan peluang kerja, terutama di sektor-sektor di mana tenaga kerja melimpah dan tingkat pengangguran tinggi (World Bank, 2020).

Dalam pelaksanaannya, program ini dilaksanakan oleh beberapa kementerian yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertanian. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, sampai dengan 31 Desember 2020 program ini mampu menyerap tenaga kerja sebesar 2,35 juta orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp23,02 triliun. Menurut sebuah studi yang dilakukan Smith et al., (2022) menyatakan Program Padat Karya PEN telah berkontribusi pada peningkatan substansial dalam tingkat pekerjaan, terutama di daerah pedesaan. Perluasan kesempatan kerja ini tidak hanya mengurangi tingkat kemiskinan tetapi juga meningkatkan standar hidup penduduk secara keseluruhan.

#### C. Dukungan Sektor UMKM

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2018, UMKM mampu menyerap hingga 97 persen dari total tenaga kerja, menyediakan 99 persen dari lapangan pekerjaan, dan menyumbang hingga 61,07 persen dari total PDB nasional. Hal inilah yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk memberikan perhatian khusus bagi sektor UMKM agar dapat bertahan di masa pandemi. Dukungan sektor UMKM di dalam PEN bertujuan untuk mengurangi cost UMKM yang pada akhirnya diharapkan dapat menekan angka pengangguran.

Berdasarkan hasil survei Bappenas, 98% UMKM mengalami kendala non-keuangan dan sejenisnya. Kendala non-keuangan yang dialami UMKM akibat dampak Covid-19 adalah terkait dengan demand shocks dan supply shocks. Sebagian besar UMKM mengalami kendala berkurangnya permintaan, meningkatnya harga bahan baku, sulitnya distribusi, dan sulitnya memperoleh bahan baku.

Tabel 1 Persentase UMKM yang Mengalami Kesulitan  
Non-Keuangan dan Sejenisnya

Kondisi	Jenis UMKM		
	Mikro	Kecil	Menengah
Mengalami Kesulitan	98%	98%	99%
Tidak Mengalami Kesulitan	2%	2%	1%

Sumber: Bappenas (diolah)

Pemerintah telah menempuh upaya pemulihan UMKM melalui kebijakan yang meringankan beban pelaku UMKM. Kebijakan ini tercantum dalam PMK Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi COVID-19, yang mencakup insentif perpajakan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, dan PPN, serta PMK Nomor 65/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan UMKM, yang memudahkan UMKM dalam membayar angsuran pokok dan bunga. Dukungan sektor UMKM meliputi program restrukturisasi kredit senilai Rp315,51 triliun untuk 4,7 juta debitur, insentif pajak PPh final yang dimanfaatkan oleh 245 ribu wajib pajak, penjaminan kredit modal kerja senilai Rp17,56 triliun untuk 890,2 ribu debitur, pembiayaan investasi melalui LPDB untuk 63 mitra koperasi dan 101 ribu UMKM, subsidi bunga untuk 25,4 juta debitur, dan Bantuan Presiden (Banpres) produktif untuk sekitar 12 juta usaha mikro.

## KESIMPULAN

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak signifikan terhadap tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Kebijakan pembatasan sosial yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengendalikan penyebaran virus berdampak langsung pada penurunan aktivitas ekonomi dan produksi, yang pada akhirnya menyebabkan banyak perusahaan harus melakukan pengurangan tenaga kerja melalui Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau bahkan menutup usahanya yang menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran. Penurunan aktivitas ekonomi tersebut juga berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan kemiskinan karena masyarakat kehilangan sumber pendapatan utama mereka.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia merupakan respon strategis terhadap dampak pandemi Covid-19 yang signifikan terhadap perekonomian. Program ini mencakup berbagai kebijakan dan inisiatif yang bertujuan untuk mendukung pemulihan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdampak pandemi. Secara keseluruhan, program PEN telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meredam dampak ekonomi pandemi Covid-19 di Indonesia. Kebijakan yang diambil antara lain Program Kartu Prakerja dan Pelaksanaan Program Padat Karya di Kementerian/Lembaga yang membantu mengurangi tingkat kemiskinan. Selain itu, untuk menjaga kelangsungan usaha dan lapangan pekerjaan, pemerintah memberikan dukungan lebih kepada sektor UMKM. Langkah-langkah strategis ini

diharapkan dapat membantu pemulihan ekonomi nasional, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pengurangan tingkat pengangguran di Indonesia.

## REFERENSI

- Prasetyo, H., & Setiadi, W. (2023). Reformasi Regulasi Melalui UU Cipta Kerja Sebagai Landasan Sinergitas Nasional Dalam Upaya Mengantisipasi Resesi Global. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 136-150.
- Fikri, Y. T. A., & Gopar, I. A. (2021). Analisis Peningkatan Angka Pengangguran akibat Dampak Pandemi Covid 19 di Indonesia. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 1(2), 107-116.
- Mardiyah<sup>1</sup>, R. A., & Nurwati, R. N. (2020). Dampak pandemi Covid-19 terhadap peningkatan angka pengangguran di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Padjajaran*.
- Kasnelly, F. A. J. S. (2020). Meningkatnya Angka Pengangguran Ditengah Pandemi (Covid-19). *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 45-60.
- Ishak, K. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Dan Inflikasi Terhadap Indeks Pembangunan Di Indonesia. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 7(1), 22-38.
- Siregar, T. M., Simbolon, T. L., Marpaung, R., Siallagan, A. P., Sitohang, A. T., & Sihombing, F. T. (2023). FAKTOR PENYEBAB PENGANGGURAN DAN STRATEGI PENANGANAN PERMASALAHAN PENGANGGURAN DI INDONESIA TAHUN 2000-2023. *Jurnal Pendidikan Multidisipliner*, 6(12).
- Budiman, E., Pangemanan, S., & Tangkuman, S. (2014). Analisis Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap pada PT. Hasjrat Multifinance Manado 2012. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1).
- Mifrahi, M. N., & Darmawan, A. S. (2022). Analisis tingkat pengangguran terbuka di Indonesia periode sebelum dan saat pandemi covid-19. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*, 111-118.
- Irawati, M., & Pakereng, M. A. I. (2023). Analisis Pengaruh Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Kemiskinan Menggunakan Metode Regresi Linier (Studi Kasus: Kota Salatiga). *Jurnal EMT KITA*, 7(2), 401-408.
- COVID, K. D. M. P. (2022). SISTEM KERUANGAN WILAYAH DAN PERUBAHAN TINGKAT. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian dan Pengembangan*, 6(1).
- Ihsani, S. F., & Rohman, M. F. (2022). Distribusi pendapatan dan kemiskinan di Indonesia: Kasus kebijakan sentralisasi, desentralisasi, dan pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 12(1), 1-22.
- Munandar, A. (2022). PENGARUH TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP ANGKA KEMISKINAN SELAMAMASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATENBANGKALAN. PENGARUH TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP ANGKA KEMISKINAN SELAMAMASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATENBANGKALAN.
- Rizki, M. (2021). Dampak program perlindungan sosial dalam mengatasi kemiskinan di tengah pandemi Covid-19. *Jurnal Good Governance*.
- <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/buletin-apbn/public-file/buletin-apbn-public-124.pdf>

- Digdowiseiso, K., Fitasari, A., & Nastiyawati, N. (2023). Dampak Dan Efisiensi Program Padat Karya Sebagai Belanja Prioritas Untuk Mengentaskan Pengangguran: Kajian Literatur. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 6(2), 2607-2621.
- Tarigan, Z. N. A. B., Dewi, F. N., & Pribadi, Y. (2022). Keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah di masa pandemi: Dukungan kebijakan pemerintah. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 15(1), 12-23.